



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMNASMEN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 741202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.725.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m ² /275 m ² di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m ² /117 m ² di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m ² /117 m ² di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
4. Tanah Seluas 432 m ² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
5. Tanah Seluas 933 m ² di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	381.000.000
1. MOBIL, INNOVA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.214.075.648
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.050.000.000
Sub Total	Rp.	7.377.325.648
III. HUTANG	Rp.	1.100.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

6.277.325.648**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.